

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRK BENER MERIAH  
TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN  
2012-2017**

**Sutama Muhammad, Ubaidullah**

**( [sutamamuhammad@gmail.com](mailto:sutamamuhammad@gmail.com) , [ubaidullah@unsyiah.ac.id](mailto:ubaidullah@unsyiah.ac.id) )**

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

**ABSTRAK**

Kabupaten Bener Meriah memiliki resiko bencana yang sangat tinggi. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Adapun program penanggulangan bencana merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai pemerintahan Legislatif. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan masing-masing sektor pemerintahan belum mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Bener Meriah. Badan legislatif yang memiliki Fungsi Pengawasan dibidang Politik dan kebijakan merupakan mitra kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah dalam upaya penanggulangan bencana, namun DPRK juga harus melakukan pengawasan pada setiap kebijakan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi Legislatif terkait pengawasan DPRK Bener Meriah terkait proses pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bener Meriah. Kemudian juga untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap program penanggulangan Bencana di Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRK Bener Meriah tidak menyeluruh

terhadap program penanggulangan bencana, termasuk pengawasan kebijakan dan aturan Qanun yang terkait pada penanggulangan bencana. Kemudian ketidakpahaman DPRK terhadap pengawasan di bidang bencana menjadikan implimentasi program tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak berjalannya perencanaan dengan baik merupakan salah satu indikator tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan DPRK Bener Meriah. Adapun jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah bahwa kendala yang dihadapi oleh DPRK Bener Meriah terkait pelaksanaan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, tidak berjalan efektif, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk program kebencanaan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

**Kata Kunci :Legislatif, Pengawasan, Bencana Alam, Bener Meriah, Aceh**

#### **ABSTRACT**

Bener Meriah District has a very high disaster risk. Disaster risk is a potential loss caused by disaster in an area and certain period of time which can be death, injury, illness, threatened soul, loss of feeling of security, evacuation, damage or loss of property, and disruption of community activities. Disaster management program is one of government policy of Bener Meriah District that needs to be supervised by DPRK as legislative government. The implementation of disaster management policy has not run well because of each sector of government does not follow the roles and responsibilities in accordance with the derivatives of the Disaster Management Plan in Bener Meriah. Legislative Agency that have the function of supervision in the field of politics and policy are partners of the BPBD Bener Meriah in the effort to overcome disaster, but DPRK also has to make improvement on each related policy. This study aims to determine DPRK Bener Meriah's supervisory function related to the process of monitoring the disaster management program implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bener Meriah Regency and also to find out what obstacles that led to ineffective DPRK Bener Meriah's supervision towards Disaster prevention programs in Bener Meriah Regency. The research used qualitative method with descriptive approach. The data obtained through primary

data sources and secondary data. Primary data obtained through field research by conducting interviews to informants. While the secondary data obtained through literature research with documents, books and related reading. The result of the research shows that the supervision done by DPRK Bener Meriah is not comprehensive. Then, the DPRK's lack of understanding on the supervision in the field of disaster made the implementation of the program not as expected. The answer to the next question is the obstacles faced by DPRK Bener Meriah in conducting the supervision caused by lack of budget for disaster programs and limited facilities and infrastructure in the disaster department which is the Regional Disaster Management Agency Bener Meriah.

**Keywords: Legislative, Supervision, Natural Disaster, Bener Meriah, Aceh**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Rencana penanggulangan bencana merupakan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah. Rencana penanggulangan bencana ini bertujuan untuk memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam penanggulangan bencana, mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah dengan berfokus kepada parameter resiko dengan dasar yang jelas dan terukur, serta menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bener Meriah dalam kesatuan tujuan.

Menurut Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bener Meriah, Bener Meriah memiliki banyak potensi bencana yang sangat tinggi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kebakaran lahan dan hutan, beserta kebakaran pemukiman penduduk. Tanah longsor di Bener Meriah disebabkan oleh topografi Bener Meriah yang berbukit-bukit serta curah hujan yang cukup tinggi berkisar antara 1.000 mm sampai 2.500 mm setiap tahunnya (BMKG, 2014). Dampak ancaman tanah longsor di kabupaten Bener Meriah seluas 1092 Ha meliputi Kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Permata, Timang Gajah dan Wih Pesam (BPBD Bener Meriah,2013). Selain itu, Bener Meriah juga

memiliki ancaman bencana angin puting beliung yang berdampak pada daerah seluas 3.998 Ha meliputi kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Weh Pesam. Kemudian bencana gempa bumi memiliki dampak yang cukup luas yaitu sebesar 57.154 Ha meliputi Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Weh Pesam. Ancaman letusan Gunung Api Burni Telong juga menjadi ancaman besar di Kabupaten Bener Meriah, menurut Peta Ancaman Letusan Gunung Api Burni Telong yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah, kawasan resiko bencana gunung api burni telong dibagi menjadi tiga kategori, kategori rendah seluas 106.885 Ha meliputi kecamatan Bukit, Gajah Putih, Timang Gajah, kemudian kategori sedang seluas 79.666 Ha meliputi Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Timang Gajah, dan Weh Pesam. Kemudian kategori tinggi dengan dampak seluas 9.740 Ha meliputi kecamatan Timang Gajah dan Weh Pesam (RPB Bener Meriah, 2013).

Dilihat dari ancaman bencana yang terdapat di kabupaten Bener Meriah pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan bencana diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan yang dibiayai dari APBN, APBA, dan APBK. Kemudian Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari APBN, APBA, dan APBK. Pemerintah daerah menganggarkan dana tidak terduga untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya akses serta tata cara penggunaannya di atur bersama pada DPRK Bener Meriah. Dari uraian diatas dapat dilihat sangat pentingnya pengawasan DPRK dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana baik itu pengawasan jalannya kebijakan hingga pengawasan terhadap anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.

Badan legislatif yang memiliki Fungsi Pengawasan dibidang Politik dan kebijakan merupakan mitra kerja dari BPBD Kabupaten Bener Meriah dalam upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti lebih tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap Program Penanggulangan Bencana Tahun 2012-2017"

---

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teoritis

Landasan teoritis disebagian literatur karya ilmiah disebut juga sebagai tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, maka mempermudah untuk memecahkan masalah yang dikaji serta terlihat kerangka pemikiran atau alur pikir. Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan teori Pemisahan Kekuasaan dan *Good Governance* sebagai pisau analisa kajian penelitian ini.

### Teori Pemisahan Kekuasaan

Menurut John Locke dalam bukunya "*Two Treatises of Government*" yang terbit pada Tahun 1690. Locke yang merupakan seorang filsuf Inggris pertama kali memberi gagasan pentingnya kekuasaan di dalam negara dipisahkan menjadi tiga bidang: pertama, kekuasaan yang membentuk peraturan perundang-undangan yang mana disebut sebagai kekuasaan legislatif, kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang termasuk kekuasaan mengadili, kemudian ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk membentuk perserikatan termasuk kekuasaan mengenai perang dan damai (Kusnardi dan Haramaily,1983:140). Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu : Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang (Miriam Budiarjo,2010:282).

### Teori *Good Governance*

Menurut Koiman (Sedarmayanti,2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Good Governance* merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

---

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap Program Penanggulangan Bencana Tahun 2012-2017 (Sutama Muhammad, Ubaidullah)

### **Pengawasan Legislatif**

Menurut Stoner dan Freeman (Sadu dan Wiyoso, 2009:143), pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan. Sedangkan Koontz (Sadu dan Wiyoso, 2009:143) berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi. Secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi, atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

### **Program Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana merupakan Suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, hal ini dikarenakan sumber data utama terletak di kantor tersebut, kemudian penelitian ini juga dilakukan di dinas-dinas terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah.

### **Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong. 2010: 3).

---

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap Program Penanggulangan Bencana Tahun 2012-2017 (Sutama Muhammad, Ubaidullah)



### Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif dinamakan dengan informan. Informan adalah orang-orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Darwinsyah, Ketua DPRK Bener Meriah
- 2) Andi Sastra, SP. M.AP, Wakil Ketua DPRK Bener Meriah
- 3) dr. Jawahir Syaputra Anggota Komisi DDPK Bener Meriah
- 4) Drs. Abdul Rahman, MM, Sekretaris DPRK Bener Meriah
- 5) Rahmatullah, Kepala Bagian Program BPBD Bener Meriah

Untuk memperoleh data atau informasi, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. *Purposive sampling* bisa juga berarti sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Ketika populasi yang diinginkan untuk penelitian ini adalah langka atau sangat sulit ditemukan dan diajak untuk menyelesaikan studi, *purposive sampling* mungkin adalah satu-satunya pilihan.

### Sumber Data

Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder. Data primer ini didapatkan secara langsung dari informan dengan melakukan wawancara dan menjadi informasi yang utama dalam penelitian ini. Sementara itu data sekunder yaitu data yang didapat baik dari buku, jurnal, koran, serta data-data media massa yang terpublikasi secara luas.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Burhan, 2007:115).

#### 2. Dokumentasi dan kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau

dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Sedangkan kajian kepustakaan sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah ada. Dokumentasi dan kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini sebagai penunjang penelitian yang akan diteliti.

### **3. Wawancara**

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugas) dengan subyek penelitian atau responden atau sumber data. (Rianto Adi, 2004: 72)

### **Teknik analisis data**

Pada tahap ini peneliti kemudian melakukan analisis data yang telah terkumpul. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (J.Moleong,2007:189).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK Bener Meriah Terhadap Program Penanggulangan Bencana**

Program penanggulangan bencana tahun 2012-2017 merupakan program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebencanaan, dimana program penanggulangan bencana ini dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah. Program-program penanggulangan bencana tersebut tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah maupun Peraturan Daerah atau Qanun. Selain itu, program penanggulangan bencana juga menggunakan anggaran yang berasal dari ABPK, APBA, dan APBN, oleh karena itu, pengawasan oleh DPRK sangat perlu dilaksanakan dalam program penanggulangan bencana.



Dari UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah jelas bahwa ruang lingkup Pengawasan DPRK bentuknya mengawasi kebijakan pemerintah dan peraturan daerah yang berlaku termasuk dalam program penanggulangan bencana. DPRK Bener Meriah sudah melakukan pengawasan terhadap sebagian kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah, seperti program-program BPBD Bener Meriah, DPRK juga telah membentuk Pansus untuk melakukan pengawasan terhadap program yang dibuat BPBD Kabupaten Bener Meriah. Namun, ada kebijakan yang perlu diawasi seperti pembangunan di Kawasan Resiko Bencana Tinggi Gunung Api Burni Telong, DPRK tidak memiliki perhatian khusus atas kebijakan yang sudah di atur dalam Qanun No 4 Tahun 2015 tentang kawasan resiko bencana Gunung Api Burni Telong. Hal ini merupakan salah satu indikator dari tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRK Bener Meriah jika merujuk pada substansi pengawasan yang meliputi perencanaan. Selain itu, DPRK belum terlalu paham tentang pengawasan terhadap program penanggulangan bencana, mengingat Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi. Pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD (Sadu dan Yonatan, 2009:149).

Kemudian, untuk penganggaran, DPRK Bener Meriah masih sangat kurang membahas anggaran untuk penanggulangan bencana, didalam aturan yang berlaku anggaran untuk penanggulangan bencana seharusnya mencapai 1% dari jumlah APBK. Pencapaian untuk menganggarkan dana tersebut masih jauh dari yang diharapkan, DPRK Bener Meriah hanya mampu menganggarkan dana setengahnya yaitu 0,5% dari APBK Bener Meriah serta tidak ada peningkatan setiap tahunnya untuk dana penanggulangan bencana. DPRK Bener Meriah tidak tahu bagaimana porsi anggaran pada tahapan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. DPRK hanya mengawasi bentuk kegiatan dalam tahapan penanggulangan bencana, bukan mengawasi anggarannya. Menurut Sadu dan Yonatan dalam meningkatkan kinerja DPRD, agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhab daerah,

---

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap Program Penanggulangan Bencana Tahun 2012-2017 (Sutama Muhammad, Ubaidullah)

DPRD dapat melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi. Agar APBD tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sadu dan Yonatan, 2009:152).

### **Kendala DPRK dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Program Penanggulangan Bencana**

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Bener Meriah juga memiliki kendala-kendala yang terjadi dalam prosesnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh DPRK Bener Meriah dalam melaksanakan pengawasan terhadap program penanggulangan bencana seperti kurangnya informasi dari masyarakat terhadap bencana yang terjadi, kurangnya anggaran untuk program penanggulangan bencana, kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan di dinas kebencanaan, kemudian kurangnya data yang jelas pada saat terjadinya bencana. Faktor tersebut yang menjadi kendala DPRK Bener Meriah dalam melaksanakan pengawasan terhadap program penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan pengawasan DPRK Bener Meriah juga berharap kepada masyarakat agar terlibat dalam menjalankan pengawasan pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak adanya mekanisme dan prosedur tindak lanjut yang baku mengakibatkan minimnya informasi masyarakat yang dihasilkan dan benar-benar bisa dijadikan sarana untuk membantu DPRK dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan, perlunya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik serta perlu disusun pedoman pengawasan oleh DPRK sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan lebih terarah (Budiyono, 2013).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Penyelenggaraan Good Governance dalam rangka penegakan nilai-nilai konstitusi menuju negara hukum yang demokratis*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2001. *Teknik Analisis Kualitatif Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia.
- Kusnardi, Moh & Harmaily Ibrahim. 1983 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. cet. V*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Moleong. MA & Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama

Siswanto, Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Strong, C.F. 2011. *Konstitusi-konstitusi politik Modern; kajian tentang sejarah & bentuk-bentuk konstitusi-konstitusi dunia*. Bandung: Nusamedia.

Wasistiono, Sadu & Wiyoso Yonatan. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.

## **1. Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*

## **2. Jurnal**

Budiyono. 2013. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 7, No. 1. Universitas Lampung.

Indyah Hayu Hariyanti. 2015. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (studi deskriptif tentang penanggulangan bencana letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3. No. 2. Fisip Unair.

### **3. Dokumen**

BPBD Bener Meriah. 2012. *Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah 2012-2017*. Redelong: BPBD Bener Meriah.

BPBD Bener Meriah. 2013. *Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2019*. Redelong: BPBD Bener Meriah

<http://bmkgo.go.id> diakses pada tanggal 3 Maret 2018